

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	4
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

Pastikan Anggarkan Program Sekolah Swasta Gratis

PEMPROV DKI Jakarta bersama dengan DPRD DKI Jakarta telah menyepakati program sekolah gratis tidak hanya berlaku untuk instansi pendidikan negeri di tahun 2025 mendatang.

Dengan demikian, sekolah swasta di Jakarta baik jenjang SD, SMP, atau SMA juga bakal digratiskan mulai Juli tahun depan.

Anggaran sekolah gratis ini sudah dialokasikan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Sementara (KUA-PPAS) APBD 2025 yang baru disepakati oleh DPRD dan Pemprov DKI.

"Kami telah menetapkan prioritas yang jelas, termasuk di sektor pendidikan. Sudah disepakati ke depan sekolah gratis untuk di sekolah negeri dan swasta," kata Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin saat dikonfirmasi, Senin (4/10/2024).

DPRD dan Pemprov DKI Jakarta telah menyepakati nilai rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun 2025 sebesar Rp 91,1 triliun.

Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Pejabat Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi dengan Khoirudin bersama tiga wakilnya, yaitu Ima

Mahdiah, Rany Mauliani, dan Basri Baco.

Adapun rencana realisasi program sekolah gratis ini telah dibahas sejak beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, Khoirudin mengaku banyak menerima keluhan warga terkait pendidikan di wilayah Jakarta.

Bahkan ada beberapa wilayah tidak menjangkau sekolah negeri terdekat karena adanya sistem zonasi, sehingga mereka terpaksa memasukan anaknya ke sekolah swasta.

Di sisi lain, biaya masih jadi masalah bagi mereka yang bersekolah di instansi pendidikan swasta.

Oleh karena itu kata Khoirudin, pemerataan pendidikan melalui program sekolah gratis baik di sekolah negeri maupun swasta, diharapkan bisa terasa manfaatnya bagi warga Jakarta.

"Kami sudah lakukan kajian dan sudah presentasi Dinas Pendidikan untuk menerima semua siswa Jakarta untuk bersekolah negeri dan swasta," ujar Khoirudin, dihimpun dari situs resmi DPRD DKI Jakarta, Jumat (4/10/2024) lalu.

"Kami ingin menyelesaikan permasalahan pendidikan yang dikeluhkan oleh warga Jakarta, terutama wilayah yang tidak ada sekolah negeri. Dengan zonasi yang ada, banyak warga yang tidak ter-cover zonasi karena tidak ada sekolah," ungkap Khoirudin.

(TribunJakarta)



Dok. PKS Jakarta